

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018-2023

Analysis of the Financial Performance of the Balikpapan City Regional Government in 2018-2023

Rina Angelina Praditya¹, Abdurrahman Maulana Yusuf²✉

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

²Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉Corresponding author: abdurrahman.maulana.yusuf@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018-2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Balikpapan periode 2018-2023 berdasarkan lima rasio keuangan yaitu: analisis pertumbuhan pendapatan, kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, dan efektivitas pendapatan asli daerah. Jenis data pada penelitian ini yaitu data kuantitatif. Sumber data adalah data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang diperoleh untuk analisis pertumbuhan pendapatan Kota Balikpapan tahun 2018-2023 mengalami penurunan secara fluktuatif, rasio kemandirian keuangan daerah masih rendah, rasio derajat desentralisasi masih belum optimal, rasio ketergantungan keuangan daerah masih sangat tinggi, dan rasio efektivitas pendapatan asli daerah terlihat sangat efektif.

Abstract

Analysis of the Financial Performance of the Balikpapan City Regional Government in 2018-2023. The purpose of this study is to determine the financial performance of the Balikpapan City Government for the 2018-2023 period based on five financial ratios, namely: income growth analysis, regional financial independence, degree of decentralization, regional financial dependence, and the effectiveness of regional original income. The type of data in this study is quantitative data. The data source is secondary data. Based on the results of the research and analysis obtained for the analysis of Balikpapan City's revenue growth in 2018-2023, it has decreased fluctuatingly, the ratio of regional financial independence is still low, the ratio of the degree of decentralization is still not optimal, the ratio of regional financial dependence is still very high, and the ratio of the effectiveness of regional original income looks very effective.

Article history

Received 2025-01-12

Accepted 2025-02-05

Published 2025-02-25

Kata kunci

Analisis Pertumbuhan Pendapatan;
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah;
Rasio Derajat Desentralisasi;
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah;
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.

Keywords

Analysis of Revenue Growth;
Regional Financial Independence Ratio;
Degree of Decentralization Ratio;
Regional Financial Dependency Ratio;
Regional Original Revenue Effectiveness Ratio.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2025 Rina Angelina Praditya, Abdurrahman Maulana Yusuf.

1. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat. Dengan adanya otonomi tersebut seharusnya pemerintah daerah Kota Balikpapan mampu berdiri sendiri dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, mampu membuat peraturan sendiri yaitu Peraturan Daerah serta peraturan pelaksanaannya, mampu mencari sumber-sumber keuangan sendiri, dan mempunyai personil dan sarana prasarana sendiri.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah bagian dari pengukuran kinerja keuangan sektor publik yang merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi memulai alat ukur finansial dan nonfinansial. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Penggunaan analisis rasio keuangan daerah secara luas telah banyak digunakan dan diterapkan pada perusahaan yang bersifat komersil. Sedangkan pada lembaga publik khususnya pada pemerintah daerah penggunaan analisis rasio keuangan masih sangat terbatas. Padahal dengan adanya analisis rasio keuangan pemerintah daerah dapat diketahui bagaimana kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dan juga dapat dijadikan acuan untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah.

Untuk melihat dan menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Balikpapan dalam mengelola sumber-sumber dana yang ada dan pertanggungjawaban pemerintah Kota Balikpapan dalam membelanjakan uang publik secara efisien dan efektif serta tingkat kemandirian pemerintah dalam mengelola rumah tangganya sendiri, maka dilakukan analisis kinerja keuangan dan kemandirian daerah dengan melihat Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berikut ini disajikan mengenai Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Daerah (APBD) Pemerintah Kota Balikpapan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Kota Balikpapan

Tahun	Pendapatan (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Lain-lain pendapatan yang sah (Rp)
2018	2.230.736.621.233,10	646.868.407.485,10	1.580.568.213.748,00	3.300.000.000,00
2019	2.469.528.492.671,23	764.087.241.241,05	1.702.441.251.430,18	3.000.000.000,00
2020	2.515.508.487.764,14	609.057.640.903,42	1.830.196.140.055,00	76.254.706.805,72
2021	2.278.259.847.189,69	755.062.500.914,79	1.443.258.420.222,00	155.781.368.006,65
2022	2.869.130.120.905,73	811.255.755.825,56	1.987.807.473.947,00	70.066.891.133,17
2023	3.632.425.125.737,23	966.208.071.540,23	2.661.560.594.348,00	155.492.424.385,23

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Balikpapan Tahun 2018-2023

Beberapa permasalahan keuangan yang dihadapi pemerintah Kota Balikpapan dilihat dari tabel diatas yaitu adanya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan subsidi dari pemerintah Pusat dan Provinsi yang tercermin dalam besarnya bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) yang tercermin dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi, kurangnya usaha dan kemampuan-kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

Penelitian ini juga dilakukan oleh Gunawan (2023) yang menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2022 dengan menggunakan 4 (empat) rasio keuangan daerah, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan efisiensi PAD. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dilihat dari rasio kemandirian keuangan dapat dikategorikan sangat baik dan mampu serta memiliki pola hubungan yang delegatif keran rata-rata rasio nya sebesar 100%. Rasio derajat desentralisasi fiskal dikategorikan sangat baik karena dalam skala interval menunjukkan rata-rata >50%. Rasio efektivitas PAD menunjukkan bahwa kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Timur sudah sangat

efektif karena rata-rata efektivitasnya diatas 100%. Rasio efisiensi keuangan daerah dapat dikatakan kurang efisien karena rata-rata efisiensi keuangan daerah provinsi Kalimantan Timur sebesar 82%.

Pengukuran kinerja keuangan dapat dijadikan evaluasi dalam memulihkan kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu juga dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya (Sari, 2021). Pengukuran kinerja dapat menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio*, dan rasio pertumbuhan. Analisis kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja di waktu yang akan datang, menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, memonitor dan mengevaluasi kinerja, membantu mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan selama periode 2018-2023 melalui analisis pertumbuhan pendapatan, rasio kemandirian keuangan, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan efektivitas pendapatan asli daerah.

1.1. Penganggaran Sektor Publik

Anggaran Sektor Publik adalah rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara selama periode tertentu biasanya 1 (satu) tahun. Tujuannya adalah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien guna mencapai berbagai tujuan ekonomi dan sosial, seperti pembangunan infrastruktur, penyedia layanan publik, dan menjaga stabilitas ekonomi. Anggaran ini mencerminkan kebijakan dan prioritas pemerintah serta berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengendalikan keuangan publik.

1.2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengertian kinerja keuangan pemerintah daerah menurut Sudaryo (2017) adalah pengukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis keuangan sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi kinerja dimasa yang akan datang. Pemerintah merupakan salah satu organisasi sektor publik yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan lain sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu *stakeholder* organisasi sektor publik. Oleh karena itu pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat dalam pemerintahan. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan alat pengendalian organisasi. Kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan baik apabila administrasi dan penyedia jasa oleh pemerintah daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif, dan efisien.

1.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan BPK laporan keuangan pemerintah daerah adalah konsolidasi dari laporan keuangan SKPD-SKPD dan laporan keuangan PPKD. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menyajikan informasi tentang status keuangan daerah, dan dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus berkualitas, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Menurut Sofyan (2022) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah informasi yang memuat data tentang berbagai unsur struktur kekayaan dan struktur finansial yang mencerminkan kinerja ekonomi organisasi pemerintah daerah dalam periode tertentu. Dari beberapa definisi maka dapat disimpulkan pengertian laporan keuangan pemerintah daerah merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran yang

ada, yang disajikan secara terstruktur, berkualitas, bermanfaat, serta sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan untuk memajukan suatu daerah.

1.4. Analisis Laporan Keuangan Daerah

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Analisis laporan keuangan merupakan suatu metode yang membantu para pengambil keputusan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pemerintah melalui informasi yang didapat dari laporan keuangan (Mahmudi, 2019). Analisis rasio keuangan Pemerintah Daerah adalah perbandingan angka-angka yang ada didalam laporan keuangan yang mengetahui posisi keuangan suatu daerah untuk menilai kinerja keuangan dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya rasio keuangan bermacam-macam tergantung kepada kepentingan dan penggunaannya begitu pula perbedaan jenis analisa dapat menimbulkan perbedaan rasio-rasionya (Santoso et al., 2021). Rasio keuangan yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam penelitian ini adalah analisis pertumbuhan pendapatan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio keuangan ini dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan jenis laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran (Deswira, 2022).

1.5. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunannya apakah karena faktor ekonom makro yang diluar kendali pemerintah daerah atau karena manajemen keuangan daerah yang kurang baik. Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi (Mahmudi, 2019).

Untuk menghitung pertumbuhan pendapatan pada tahun tertentu (t) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan th T} = \frac{\text{Pendapatan Th t} - \text{Pendapatan Th (t - 1)}}{\text{Pendapatan Th (t - 1)}} \times 100\%$$

1.6. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi tingkat angka rasio menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2019). Berikut adalah rumus rasio kemandirian keuangan daerah:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

1.7. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi adalah hasil perhitungan persentase rasio berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di dapat oleh Pemerintah Daerah maka semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi secara mandiri (Mahmudi, 2019). Berikut ini perhitungan atas rasio derajat desentralisasi:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

1.8. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah (Mahmudi, 2019). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

1.9. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah itu sendiri. Semakin tinggi rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka kemampuan Pemerintah Daerah pun semakin baik (Mahmudi, 2019). Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin besar realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya (Shinta, 2022). Berikut perhitungan atas rasio efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

2. Metode

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah didapatkan sebagaimana mestinya. Metode ini dilakukan dengan perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan permasalahan yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018-2023 dilihat dari analisis pertumbuhan pendapatan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, serta rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.2. Sumber Data

Data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari objek yang diteliti dalam bentuk yang sudah jadi seperti, catatan keuangan, struktur organisasi dan lain-lain.

2.3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan atau instansi yang diteliti dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan memperoleh data dari website resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan. Data yang diperoleh menjadi dua, yaitu data umum dan data khusus. Data umum berupa gambaran umum Kota Balikpapan sedangkan data khusus berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Balikpapan periode 2018-2023.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Kota Balikpapan Tahun 2018-2023

Rasio pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Berdasarkan kondisi data tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sekarang dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Balikpapan Tahun 2018-2023 diperoleh hasil perbandingan pertumbuhan pendapatannya sebagai berikut:

Tabel 2. Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018-2023

Tahun	PAD Saat ini	PAD Tahun Sebelumnya	PAD Saat ini- PAD Sebelumnya	Pertumbuhan	Ket
2018	646.868.407.485,10	612.250.040.990,01	34.618.366.495,09	6%	Sangat Rendah
2019	764.087.241.241,05	646.868.407.485,10	117.218.833.755,95	18%	Rendah
2020	609.057.640.903,42	764.087.241.241,05	-155.029.600.337,63	-25%	Sangat Rendah
2021	755.062.500.914,79	609.057.640.903,42	146.004.860.011,37	24%	Sedang
2022	811.255.755.825,56	755.062.500.914,79	56.193.254.910,77	7%	Sangat Rendah
2023	966.208.071.540,23	811.255.755.825,56	154.952.315.714,67	19%	Rendah
Rata-Rata				8%	Sangat Sedang

Ket (%)

Sangat Rendah : 0-10

Rendah : 11-20

Sedang : 21-30

Tinggi : >40

3.2. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018-2023

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Berdasarkan kondisi data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bantuan penerimaan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pinjaman dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018-2023

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	RKKD	Keterangan
2018	646.868.407.485,10	1.580.568.213.748,00	41%	Rendah
2019	764.087.241.241,05	1.702.441.251.430,18	44%	Rendah
2020	609.057.640.903,42	1.830.196.140.055,00	33%	Rendah
2021	755.062.500.914,79	1.443.258.420.222,00	52%	Sedang
2022	811.255.755.825,56	1.987.807.473.947,00	41%	Rendah
2023	966.208.071.540,23	2.661.560.594.348,00	36%	Rendah
Rata-Rata			41%	Rendah

Ket (%)

Sangat Rendah : 0-25

Rendah : >25-50

Sedang : >50-75

Tinggi : >75-100

3.3. Rasio Derajat Desentralisasi Kota Balikpapan Tahun 2018-2023

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Berdasarkan kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total Pendapatan Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Balikpapan, maka diperoleh perhitungan rasio derajat desentralisasi nya sebagai berikut:

Tabel 4. Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018-2023

Tahun	Realisasi PAD	Total Penerimaan Daerah	RDD	Keterangan
2018	646.868.407.485,10	2.230.736.621.233,10	34%	Rendah
2019	764.087.241.241,05	2.469.528.492.671,23	32%	Rendah
2020	609.057.640.903,42	2.515.508.487.764,14	41%	Rendah
2021	755.062.500.914,79	2.278.259.847.189,69	33%	Rendah
2022	811.255.755.825,56	2.869.130.120.905,73	35%	Rendah
2023	966.208.071.540,23	3.632.425.125.737,23	37%	Rendah
Rata-Rata			31%	Rendah

Ket (%)

Sangat Rendah : 0-25

Rendah : >25-50

Sedang : >50-75

Tinggi (Mandiri) : 75-100

3.4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2018-2023

Rasio Ketergantungan keuangan daerah dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pendapatan daerah itu sendiri dengan total pendapatan (Imelda 2021). Berdasarkan kondisi pendapatan transfer dan total pendapatan daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018-2023, maka perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Penerimaan Daerah	Rasio	Ket
2018	1.580.568.213.748,00	2.230.736.621.233,10	71%	Sangat Tinggi
2019	1.702.441.251.430,18	2.469.528.492.671,23	69%	Sangat Tinggi
2020	1.830.196.140.055,00	2.515.508.487.764,14	72%	Sangat Tinggi
2021	1.443.258.420.222,00	2.278.259.847.189,69	63%	Sangat Tinggi
2022	1.987.807.473.947,00	2.869.130.120.905,73	69%	Sangat Tinggi
2023	2.661.560.594.348,00	3.632.425.125.737,23	73%	Sangat Tinggi
Rata-Rata			70%	Sangat Tinggi

Ket (%)

Sangat Rendah : 00,00-10,00

Rendah : 10,00-20,00

Sedang : 20,00-30,00

Cukup : 30,00-40,00

Tinggi : 40,00-50,00

Sangat Tinggi : >50,01

3.5. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah (Mahmudi, 2019). Berdasarkan kondisi data tentang Realisasi PAD dan target PAD dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Balikpapan periode 2018-2023, maka untuk perhitungan rasio efektivitas Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6. Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi PAD	PAD yang Dianggarkan	Rasio	Ket
2018	646.868.407.485,10	678.500.000.000,00	95%	Cukup Efektif
2019	764.087.241.241,05	688.424.448.700,00	111%	Sangat Efektif
2020	609.057.640.903,42	471.519.353.613,00	129%	Sangat Efektif
2021	755.062.500.914,79	675.712.743.600,00	112%	Sangat Efektif
2022	811.255.755.825,56	785.515.293.200,00	103%	Sangat Efektif
2023	966.208.071.540,23	985.507.900.872,00	98%	Cukup Efektif
Rata-Rata			108%	Sangat Efektif

Ket (%)

Sangat Efektif : >100

Efektif : 100

Cukup Efektif : 90-99

Kurang Efektif : 75-89

3.6. Pembahasan

Analisis rasio keuangan daerah Kota Balikpapan Tahun 2018-2023 dijabarkan sebagai berikut:

1) Analisis Pertumbuhan Pendapatan Kota Balikpapan Tahun 2018-2023

Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan pendapatan dalam tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Balikpapan selama periode 2018-2023 menunjukkan ketidakstabilan, mengalami penurunan secara fluktuatif. Pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 6% atau sebesar Rp34.618.366.495,09. Ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pendapatan daerah, yang berasal dari peningkatan penerimaan pajak serta dana transfer pusat yang lebih besar. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 18% atau sebesar Rp117.218.833.755,95. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -25% atau sebesar Rp155.029.600.337,63. Penurunan ini diakibatkan adanya pandemi Covid-19 sehingga pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada saat itu mengarah ke negatif.

Tahun 2021 mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih lanjut dalam pertumbuhan pendapatan sebesar 24% atau sebesar Rp146.004.860.011,37 yang disebabkan oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020. Kemudian, di tahun 2022 mengalami peningkatan pertumbuhan pendapatan dari tahun 2021 sebesar 7% atau sebesar Rp56.193.254.910,77. Hal ini disebabkan adanya reformasi manajemen keuangan daerah yang meningkatkan pendapatan secara signifikan. Tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya sebesar 19% atau sebesar Rp154.952.315.714,67. Dapat disimpulkan bahwa selama 6 tahun terakhir peningkatan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan mengalami peningkatan yang tidak stabil sehingga rata-rata pertumbuhan menunjukkan nilai 8% yang menurut skala interval pertumbuhan pendapatan termasuk kategori sangat rendah.

2) Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah paling rendah adalah pada tahun 2020 sebesar 33% menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp609.057.640.903,42 sedangkan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.830.196.140.055,00 yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada turunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 33% sehingga tingkat kemandirian Kota Balikpapan pada tahun 2020 dikategorikan rendah. Pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 52% atau sebesar Rp755.062.500.914,79 dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya dan menunjukkan penurunan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.443.258.420.222,00. Hal ini menunjukkan perbaikan yang baik dalam kemandirian keuangan daerah. Setelah peningkatan besar di Tahun 2021, rasio kemandirian keuangan Kota Balikpapan di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 41%. Penurunan ini menunjukkan bahwa peningkatan di Tahun 2021 tidak sepenuhnya berkelanjutan. Meski demikian, nilai ini masih menunjukkan kemandirian daerah yang cukup baik dalam membiayai kebutuhannya. Tahun 2023 mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun sebelumnya sebesar Rp966.208.071.540,23 atau sebesar 36% namun jika dilihat dari skala interval kemandirian keuangan daerah dikategorikan rendah karena di tahun ini Pemerintah Kota Balikpapan paling tinggi menerima Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2.661.560.594.348,00 yang artinya tingkat kemandirian Kota Balikpapan masih rendah.

Dari perhitungan rasio di atas menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Balikpapan tahun 2018-2023 dikategorikan rendah karena berada di skala interval 41% yang berarti daerah tersebut masih cukup bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat atau Provinsi untuk membiayai sebagian besar kebutuhan belanja daerah nya.

3) Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Kota Balikpapan Tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Balikpapan selama 6 (enam) tahun terakhir belum memiliki persentase nilai yang stabil di setiap tahunnya menurut rasio derajat desentralisasi. Pada tahun 2018 rasio desentralisasi sebesar 34 %. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan rasio derajat desentralisasi sebesar 32%. Ini menunjukkan bahwa adanya upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD. Akan tetapi pada tahun 2020 menunjukkan rasio derajat desentralisasi sebesar 41 % yang berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan hanya berjumlah Rp609.057.640.903,42 yang berarti bahwa terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mengurangi pendapatan daerah dari sektor-sektor penting, dan meningkatkannya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2.515.508.487.764,14 dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 mencatat peningkatan tajam pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya sebesar Rp811.255.755.825,56 dalam rasio desentralisasi sebesar 33%. Peningkatan ini disebabkan oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi dan upaya intensif dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD, namun Pemerintah Daerah masih bergantung terhadap pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dengan ditunjukkan jumlah pendapatan transfer sebesar Rp2.869.130.120.905,73. Pada tahun 2023 peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp966.208.071.540,23 atau sebesar 37% dari tahun sebelumnya. Namun pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga meningkat sebesar Rp3.632.425.125.737,23.

4) Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018-2023

Berdasarkan hasil perhitungan dalam Tabel diatas diketahui bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 yaitu sebesar 73% yang merupakan tahun dengan rasio tertinggi pada tahun terakhir dan rasio terendah yaitu pada tahun 2021 yaitu sebesar 6%. Rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Balikpapan selama 6 tahun terakhir dikategorikan sangat tinggi karena mencapai tingkat ketergantungan >50% yaitu 70%. Menurut perhitungan rasio ketergantungan daerah Kota Balikpapan selama periode 2018-2023 dapat dikatakan masih sangat bergantung kepada Pemerintah Pusat. Total pendapatan daerah masih banyak yang berasal dari pendapatan transfer. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Balikpapan belum mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah secara efektif dan efisien dalam memperoleh Pendapatan Daerah.

5) Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018-2023

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah Kota Balikpapan Tabel diatas menunjukkan bahwa anggaran pendapatan asli daerah Kota Balikpapan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Diketahui bahwa efektivitas realisasi PAD Kota Balikpapan pada tahun 2018 sebesar 95% dari tahun 2017, tahun 2019 realisasi PAD naik 111%. Kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan realisasi PAD sebesar Rp609.057.640.903,42 dari total realisasi PAD tahun sebelumnya. Tahun 2021 total realisasi PAD naik sebesar 112% dari realisasi PAD tahun sebelumnya atau sebesar Rp755.062.500.914,79 jumlah ini lebih besar dari anggaran PAD. Tahun 2022 realisasi PAD sebesar Rp811.255.755.825,56 lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2023 realisasi PAD cukup efektif dari tahun-tahun sebelumnya.

4. Simpulan

- 1) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan ditinjau dari Analisis Pertumbuhan Pendapatan dalam satu periode ke periode berikutnya tidak memiliki kenaikan yang stabil cenderung mengalami penurunan secara fluktuatif.
- 2) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama periode 2018-2023 dikategorikan rendah karena berada pada skala interval 41% yang berarti daerah tersebut masih cukup bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat atau Provinsi untuk membiayai sebagian besar kebutuhan belanja daerahnya.

- 3) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan jika dilihat dari tingkat derajat desentralisasi pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018-2023 dikategorikan rendah karena berada pada skala interval 31% yang menunjukkan bahwa total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan selama 6 tahun terakhir lebih rendah bila dibandingkan dengan total Penerimaan Transfer dari Pemerintah Pusat.
- 4) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan jika dilihat dari tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018-2023 dikategorikan sangat tinggi karena mencapai tingkat ketergantungan >50% yaitu 70
- 5) Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Balikpapan jika dilihat dari Tingkat efektivitas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018-2023 dapat dikatakan sangat efektif karena berada pada interval diatas 100%, hal ini menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Balikpapan selama 6 (enam) tahun anggaran sudah termasuk sangat baik dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulaziz, N. S. (2021, October). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015-2019. In *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper* (Vol. 1, No. 2, pp. 646-659).
- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 83-93.
- Ariadi, W., & Jatmika, W. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dimasa Pandemi Coved-19. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 11-15.
- Asri, D. (2022). *Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. 11(1), 130-138.
- Deswira, A. (2022). *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah : Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar*. 17(1), 72-88.
- Handayani, F. (2023). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2017-2021*. 12(01), 41-48.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34-38.
- Kurniawan, A., Mutiarin, D., Cahyadi, N., & Saputro, E. (2023). *Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2017-2021*. 157-168.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laoran Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi keem). Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Maulidnda, D. F. (n.d.). *Analisis Kinerja Realisas Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Balikpapan*.
- Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi)*, 14(1), 11-20.
- Pandjaitan, M. F., Tommy, P., & Untu, V. N. (2018). Analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah kota manado tahun 2011-2016. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(3).
- Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018. *Among Makarti*, 14(2).
- Putri, R. S. E., & Munandar, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(3), 2296-2313.